

DAFTAR PUSTAKA

Buku

_____, Sarjita dan Hasan Basri Nata Menggala, *Pembatalan dan kebatalan Hak atas Tanah*, Yogyakarta, Tugu Jogja Pustaka), 2005.

Arikunto, Suharisini, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2006.

Colombijn, Freek, *Under Construction The Politics of Urban Space and Housing during the Decolonization of Indonesia 1930-1960*, Leiden, KITLV Press, 2010.

Diantha, I Made Pasek, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta Timur, Prenadamedia Group, 2019.

Dick, Howard W., *Surabaya, City of Work: Socioeconomic History, 1900-2000*, Singapore, Singapore University Press, 2003.

Harsono, Boedi, *Undang-Undang Pokok Agraria: Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanannya*, Jakarta, Djambatan, 2007.

Ismail, Nurhasan, *Hukum Pengurusan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Teori dan Praktik*, Malang, Setara Press, 2024.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Grup, 2019.

Mertokusumo, Sudikno, *Perundang-Undangan Agraria Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1999.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Aditya Citra Bakati, 2004.

Parlindungan, A.P. *Konversi Hak-hak atas Tanah*. Bandung, Mandar Maju, 1990.

Parlindungan, A.P. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung, Mandar Maju, 1999.

Perangin, Effendi. *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi*, Jakarta, Rajawali, 1986.

Perangin, Effendi. *Praktek Permohonan Hak atas Tanah*, Jakarta, Rajawali, 1991.

Santoso, Urip, *Hukum Agraria Kajian Komperhensif*, Jakarta, Prenadamedia Grup, 2015.

Satrio, J., *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, 1999.

Satrio, J., *Pelepasan Hak, Pembebasan Hutang dan Merelakan Hak (rechtsverwerking)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016.

Sembiring, Julius, *Tanah Negara*, Jakarta, Kompas Penadamedia Group 2016.

Sumardjono, Maria, S.W., *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2001.

Sumardjono, Maria S.W., *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2009.

Sumardjono, Maria S. W., *Tanah untuk Kesejahteraan Rakyat*, Yogyakarta, Bagian Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010.

Sumardjono, Maria S. W., *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2019.

Sutedi, Adrian, *Sertifikat Hak atas Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo, 2007.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad* 1847 No. 23).

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45).

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 2, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1571).

Undang – Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dicabut dengan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3587).

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun

2005 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor,
Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 5533).

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak
Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6630).

Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan
Konversi Hak *Eigendom* dan Hak-Hak Lain-lainnya yang aktanya
belum diganti (Tambahan Berita Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1961 Nomor 2345).

Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan
Konversi dan Pendaftaran Hak-Hak Indonesia Atas Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan
Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan
tentang Kebijakan-selanjutnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-
Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1979
tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian
Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1112)

Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369)

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 408/KPTS/1995 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 627/KPTS/1987 sebagai Pelaksanaan Likuidasi Di Kota-Kota Lain.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 3).

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 1).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 394/Pdt.G/2017/PN Surabaya Tanggal 7 Mei 2018.

Jurnal

Agus Sekarmadji, 2023, "Pendaftaran Tanah Bekas Tanah Partikelir", *Notaire*, 6, No. 1, (Februari 2023): 4-5, <https://doi.org/10.20473/ntr.v6i1.41814>.

Idam Setiyawan, "Policy of Kampong Improvement and Public Housing: Surabaya Colonial Period 1900-1940), *Lembaran Sejarah* 13, No. 2, (Oktober 2017): 158. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.33540>.

James L. Cobban, “Public Housing in Colonial Indonesia”, Cambridge University Press 27, No. 4, (Oktober 1993): 873.
<https://www.jstor.org/stable/312834>

Pedro Sutanto, 2022, “Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Bekas *Eigendom Verponding* Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah”, *Jurnal Dialektika Hukum*, 4, No. 2 (Desember 2022): 91-123
<https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2.776>.

Wenardi Wirawan, 2020, “Peralihan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Dengan Menggunakan Akta Penyerahan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1567 K/Pdt/2018”, *Jurnal Notary Indonesian Universitas Indonesia*, 2, No.32 (September 2020): 695-713 <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/32/>.

Freek Colombijn, “Public housing in post-colonial Indonesia The revolution of rising expectations”, *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 167, No. 4, (Desember 2011): 440. [10.1163/22134379-90003579](https://doi.org/10.1163/22134379-90003579)

Agus Sekarmadji, “Pendaftaran Tanah Bekas Tanah Partikelir”, *Notaire* 6 No. 1, (Februari 2023): 4-5, <https://doi.org/10.20473/ntr.v6i1.41814>.
Thomas Nugroho Aji , Sri Mastuti Purwaningsih , Arief Sudrajat, “Market Regulatory in Surabaya 1914 – 1930”, *Proceedings of the 1st International Conference on Environment and Sustainability Issues* 1, No. 1, (Januari 2019) : 1, [10.4108/eai.18-7-2019.2290385](https://doi.org/10.4108/eai.18-7-2019.2290385).

Disertasi

Anwari, Ikhsan Rosyid Mujahidul, “Kebijakan Perekonomian Gemeente Surabaya Tahun 1906-1942”, *Disertasi*, Universitas Airlangga, 2016.

Tesis

Ayub, Aji Ilham Al. “Jual Beli di Bawah Tangan Bekas Tanah Hak
Eigendom di Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan”, *Tesis*,
Universitas Negeri Sebelas Maret, 2024.

Rini Susanty, “Perlindungan Hukum Pembeli Atas Jual Beli Tanah Bekas
Hak *Eigendom Verponding*”, *Tesis*, Universitas Brawijaya, 2019.